

RENJA 2018

RENCANA KERJA



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 ini disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 pada prinsipnya merupakan amanah dari Peraturan tersebut di atas dan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 ini dapat menjadi bahan masukan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Selain dari pada itu, kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, sehingga untuk itu diharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun guna terciptanya peningkatan kinerja organisasi sebagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja.

Medan,

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVSU**

**H. AGUS TRIPRIYONO, SE, M.Si.Ak, CA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640819 198503 1 003**

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Penyusunan rancangan Rencana Kerja dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil SKPD sesuai Peraturan Gubernur nomor 39 Tahun 2016 dan dirubah dengan Peraturan Gubernur nomor 15 Tahun 2017 dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu, rencana pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu. Dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang agar dapat disusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Rencana Kerja SKPD.
2. Tahap penyajian Rencana Kerja SKPD.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provsu Tahun Anggaran 2018 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2018, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selaras dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu Tahun 2017-2018.

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu pada periode Renstra 2017-2018 ditetapkan sebanyak 4 (empat) indikator kinerja pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Tersedianya dokumen KUA dan PPAS APBD dan P-APBD
3. Pembangunan dan implementasi e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang e-budgeting
4. Melakukan percepatan penyusunan dokumen anggaran, penatausahaan dan realisasi anggaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6);
 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016

Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 15);

12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 30).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan Renja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, Sedangkan tujuannya adalah menyusun program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara serta untuk mengetahui :

1. Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.
3. Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.
4. Target Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.
5. Pagu indikatif program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.
2. Mengevaluasi Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun sebelumnya.

3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.
5. Sebagai salah satu dokumen pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) 2017 adalah sebagai berikut :

BAB. I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB. II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Kinerja
- 2.2 Analisa Kinerja pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.1.1. Kedudukan
 - 3.1.2. Tugas Pokok
 - 3.1.3. Fungsi
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
 - 3.3. Program dan Kegiatan
 - 3.4. Organisasi
1. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra
 2. Pendanaan dan Prakiraan Maju Pagu Indikatif

BAB. IV. P e n u t u p

B A B I I

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra SKPD

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), indikator keluaran (output) dan hasil (outcome). Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Berdasarkan program dan kegiatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu pada pelaksanaan sejumlah kegiatan melalui program yang ada, dengan menggunakan dana APBD yang telah dianggarkan pada setiap tahunnya dan mengevaluasi serapan keuangan pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

Program/kegiatan prioritas dalam mendukung program pembangunan daerah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu Tahun Anggaran 2017 mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan yaitu:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan Komputer
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal
2. Pengelolaan Aset dan Persediaan Menggunakan Aplikasi SIMDA BMD
3. Sosialisasi Pergub Persediaan

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Triwulan APBD
2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penyelesaian Dokumen Penetapan Kinerja
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD
4. Penyusunan Anggaran Kas Pemprov APBD dan P.APD
5. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
6. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
7. Pengelolaan Pajak PPN dan PPH
8. In House Training Pengelolaan Keuangan Daerah

F. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1. Penyusunan Standar Satuan Harga
2. Pemuktahiran Data Aset Tetap Milik Pemprov
3. Penertiban Aset
4. Penghapusan Aset Tetap dan Barang Inventaris Lainnya
5. Tim Task Force Pembenahan Aset
6. Verifikasi dan Rekonsiliasi Pengalihan Kewenangan Pengelolaan BMD dari Kab/Kota ke Pemprov
7. Sosialisasi Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Monitoring dan Verifikasi data mutasi BMD dalam rangka memenuhi amanat PP 18 Tahun 2016
9. Pembuatan Status Pemanfaatan BMD
10. Pengurusan dan pembaharuan sertifikasi tanah milik Pemprov akibat pemekaran wilayah Kab/Kota
11. Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan barang tidak bergerak milik pemprov
12. Peningkatan Kualitas SDM Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah

13. Evaluasi Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKPBM) dan Evaluasi Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKPBM) serta Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBM)

G. Program Peningkatan Kapasitas Kelembangan Pemerintah Daerah

1. Peningkatan Administrasi Dalam Rangka Penutupan Buku Akhir Tahun
2. Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara
3. Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara
4. Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
5. Penyusunan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara
6. Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara
7. Tim Pembinaan Administrasi Gaji PNS Daerah pada SKPD di Lingkungan Pemprov
8. Bintel Penyusunan Laporan keuangan Berbasis akrual di Lingkungan Pemprov
9. Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD
10. Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota
11. Sosialisasi Sisdur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah
12. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sistem Cash Managemen Sistem (CMS)
13. Penatausahaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Hibah
14. Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)/Dokumen pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) SKPD
15. Penyusunan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemprov
16. Penyelenggaraan Outbond PNS di lingkungan BPKAD Provsu
17. Penyusunan RKA BPKAD dan RKA BPKAD Perubahan APBD
18. Penyusunan Renja BPKAD Provsu
19. Penyusunan dan Rekapitulasi data APBD Kab/Kota
20. Monitoring dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
21. Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD

22. Pengelolaan Aplikasi SIMDA dalam Penyusunan Pengelolaan Anggaran
23. Penyusunan DPA BPKAD dan DPPA BPKAD Provsu
24. Penyimpanan, Penataan dan Pengarsipan Berkas BPKAD Provsu
25. Pengelolaan Aplikasi SIMDA Integrasi Cash Manajemen System (CMS) dalam Penatausahaan Keuangan pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
26. Rapat Kerja Teknis Keuangan Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota
27. Forum Group Diskusi Akuntansi Se-Sumatera Utara
28. Sinkronisasi dan Harmonisasi Eksekutif dan Legislatif dalam Perencanaan Penganggaran Pembangunan Daerah
29. Workshop Inventarisasi Aset
30. Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017
31. Penyusunan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara 2017
32. Pendamping dan Pelatihan Penyusunan Standard Pelayanan dan Standard Operasional Procedut Administrasi Pemerintah
33. Verifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) SKPD
34. Pembuatan Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
35. Tim Informasi Media Sosial dan SMS pengaduan BPKAD
36. Koordinasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Utara
37. Pembinaan Penatausahaan Bendahara Daerah
38. Pembuatan Sistem E-Keuangan

Sesuai dengan Laporan Realisasi Fisik, Keuangan dan Aset SKPD Badan Pengelolaan keuangan Dan Aset Daerah Provsu, terdapat kemungkinan perbedaan antara program dan kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan dalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dengan program dan kegiatan yang ditampung di dalam APBD Provsu. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian atas program kegiatan yang lebih prioritas untuk dilaksanakan, dan kebutuhan akan kegiatan baru sesuai dengan terbitnya peraturan-peraturan baru tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rekapitulasi dapat dilihat pada akhir periode pelaksanaan Renja SKPD.

2.2. Analisis Kinerja pelayanan SKPD

Pencapaian target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah berdasarkan target jangka menengah RPJMD dalam dokumen rencana strategis (Renstra) Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pada umumnya sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat terlaksana dengan baik. Adapun kendala-kendala untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sebagian besar karena waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi, Perubahan Nomenklatur dan pagu Anggaran Kegiatan Badan pada P. APBD Tahun Anggaran berjalan. Mekanisme pelaksanaannya adalah untuk Efisiensi Anggaran sesuai dengan proyeksi pendapatan yang diprediksi tidak tercapai.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi atas tidak terlaksananya beberapa kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang baik atas setiap kegiatan yang telah direncanakan. Begitu juga dengan koordinasi antar bidang lebih ditingkatkan. Selain itu, perlu juga diadakan pelatihan / bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung kelancaran kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu. Koordinasi antar instansi (SKPD) dan Pemerintah Kabupaten / Kota baik dalam hal pengumpulan data dan lainnya, untuk lebih ditingkatkan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja SKPD Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di sesuaikan dengan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun berjalan. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Catatan tersebut antara lain terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

B A B I I I

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provsu mempunyai kaitan yang erat dimana tugas pokok dan fungsi harus mendukung Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Keterkaitan Prioritas pembangunan Nasional diantaranya adalah :

Agenda Pembangunan	Prioritas Pembangunan
Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah - Meningkatkan Partisipasi Publik
Memperjuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah dan memberantas korupsi
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan sektor keuangan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada Pembangunan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintah serta meningkatkan Partisipasi Publik. Perlunya Akuntabilitas guna untuk mencegah dan memberantas korupsi. Kegiatan keuangan Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah dapat menjadi penguatan sektor keuangan.

Hal tersebut diatas menunjukkan adanya keterkaitan antara Prioritas pembangunan Nasional dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Bertitik tolak dari tugas, fungsi dan tanggungjawab Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian administrasi kesekretariatan, perbendaharaan dan kas daerah, pengelolaan anggaran, akuntansi, aset daerah dan upkd serta anggaran keuangan daerah kabupaten/kota, sekaligus merupakan identitas masa depan, artikulasi citra, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan yang realistis dan kredibel serta menjadi budaya organisasi.

Selaras dengan itu, maka visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu adalah :

" Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang profesional, akuntabel dan transparan, berbasis teknologi informasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku "

Berkaitan dengan visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara maka Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, Program dan Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi dan Perkantoran , yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan administrasi. Sasaran program ini adalah peningkatan pelayanan administrasi. Program ini terdiri dari 10 kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung peningkatan kinerja. Sasaran program ini adalah peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur. Program ini terdiri dari 6 kegiatan.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Sasaran program ini adalah peningkatan kapasitas ketaatan aparatur di bidang keuangan daerah. Program ini terdiri dari 2 kegiatan.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , yang bertujuan untuk mengefektifkan evaluasi kinerja dan membuat perencanaan seakurat mungkin serta meningkatkan kualitas laporan-laporan yang berhubungan dengan capaian kinerja dan keuangan. Sasaran program adalah peningkatan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja. Program ini terdiri dari 6 kegiatan.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemda di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sasaran program ini adalah terbitnya peraturan-peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah, meningkatnya waktu capaian atas siklus-siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan hingga pelaporan serta meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemda. Program ini terdiri dari 12 kegiatan.
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran tugas pokok dan fungsi lembaga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sasaran program ini adalah kapasitas lembaga. Program ini terdiri dari 39 kegiatan.
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan berkualitas yang bersih dan berwibawa. Sasaran program ini adalah penatausahaan. Program ini terdiri dari 19 kegiatan.

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu merupakan salah satu Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Asisten Administrasi Umum dan Aset.

Tugas Pokok Badan adalah berkaitan dengan Keuangan dan Aset yaitu :

“Merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah.”

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu menyelenggarakan fungsi :

- a. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang perbendaharaan dan kas daerah, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset;
- b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pelaksanaan tugas pambantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Jumlah Program dan Kegiatan

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan yaitu:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8. Penyediaan Makanan dan Minumam
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
10. Publikasi/Iklan/Layanan masyarakat

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
2. Pengadaan Komputer
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Sarana Mobilitas Darat
5. Pengadaan Cinderamata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
6. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah ke-VIII
2. Pengelolaan Aset dan Barang Persediaan Menggunakan Aplikasi SIMDA BMD
3. Pendidikan dan pelatihan formal
4. Bimbingan Teknis bagi Evaluator untuk mengevaluasi R.APBD/R.P.APBD dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota
5. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan di Kabupaten/Kota pada UPPPKKK Wilayah Pantai Timur
6. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan di Kabupaten/Kota pada UPPPKKK Wilayah Pantai Barat

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan keuangan Triwulanan dan Semesteran
2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penyelesaian Dokumen Penetapan Kinerja
3. Penyusunan Anggaran Kas Pemprov APBD dan P.APBD TA. 2018
4. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
5. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
6. Pengelolaan Pajak PPN dan PPH
7. In House Training Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Bintek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Pemprov
9. Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemprov
10. Migrasi Data dari Aplikasi SIMDA Keuangan ke Aplikasi E-Keuangan
11. Forum Group Diskusi Akuntansi se-Sumatera Utara
12. Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

F. Program Peningkatan Kapasitas Kelembangan Pemerintah Daerah

1. Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara
2. Tim Pembinaan Administrasi Gaji PNS Daerah pada SKPD di Lingkungan Pemprov
3. Sosialisasi Sisdur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah
4. Pengelolaan Aplikasi SIMDA Integrasi Cash Manajemen System (CMS) dalam Penatausahaan Keuangan
5. Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara
6. Penyusunan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara
7. Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara

8. Verifikasi DPA/DPPA/DPAL SKPD Pemprov
9. Verifikasi RKA/RKA Perubahan SKPD Pemprov
10. Tim Pengelolaan Penyusunan Anggaran Berbasis Aplikasi Online
11. Pembuatan Sistem E- Keuangan
12. Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD
13. Evaluasi APBD Kabupaten/Kota pada UPPPKKK Wilayah pantai barat.
14. Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota UPPPKKK Wilayah Pantai Barat
15. Penyusunan dan Rekapitulasi Data APBD Kabupaten/Kota pada UPPPKKK Wilayah Pantai Barat
16. Monitoring dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota pada UPPPKKK Wilayah Pantai Barat
17. Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD pada UPPPKKK Wilayah Pantai Barat
18. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sistem Cash Management Sistem (CMS)
19. Tim Penatausahaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Hibah
20. Penyusunan RKA BPKAD APBD dan RKA BPKAD Perubahan APBD
21. Penyusunan Renja BPKAD Provsu
22. Penyusunan DPA BPKAD dan DPPA BPKAD Provsu
23. Penyimpanan, Penataan dan Pengarsipan berkas BPKAD Provsu
24. Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan Standard Pelayanan dan Standard Operasional Procedur Administrasi Pemerintah
25. Pengembangan Website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
26. Tim Informasi Media Sosial dan SMS Pengaduan BPKAD
27. Sosialisasi Pajak PPn, dan PPh Pasal 22, 23, Final Pasal 4 ayat 2
28. Bimbingan Teknis Sistem Online Penerimaan Daerah TA. 2018
29. Evaluasi APBD Kabupaten/Kota pada UPPPKKK Wilayah Pantai Timur
30. Peningkatan kualitas penyusunan APBD pada UPPPKKK Wilayah Pantai Timur
31. Penyusunan dan Rekapitulasi Data APBD Kabupaten/Kota pada UPPPKKK Wilayah Pantai Timur

32. Monitoring dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota pada Wilayah Pantai Timur
33. Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota UPPPKKK Wilayah Pantai Timur
34. Sinkronisasi dan Harmonisasi Eksekutif dan Legislatif dalam Perencanaan Penganggaran Pembangunan Daerah
35. Peningkatan Kualitas Proses Penganggaran di Provinsi Sumatera Utara
36. Rekonsiliasi Data Belanja Dana Bagi Hasil Provinsi Kepada Kab/Kota
37. Koordinasi dan Pelaporan Dana Transfer Provinsi Sumatera Utara
38. Penyusunan Renstra BPKAD Provsu 2018-2023
39. Penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2018

G. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyusunan Penggolongan dan kodefikasi BMD terkait Penyusunan Standar Harga Barang
2. Pemuktahiran Data Aset tetap Milik Pemprovsu untuk Bahan Neraca Per 31 Desember Tahun 2017
3. Penertiban Aset
4. Tim Task Force Pembenahan Aset
5. Pengurusan dan Pembaharuan sertifikasi tanah milik pemprovsu
6. Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan barang tidak bergerak milik pemprovsu
7. Peningkatan kualitas SDM Dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah
8. Evaluasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD), Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD)
9. Monitoring dan Verifikasi Penatausahaan Aset Pasca Penyerahan P3D akibat UU No. 23 tahun 2014

10. Penyusunan Buku Realisasi Pengadaan Barang Belanja Langsung
11. Monitoring dan Verifikasi penatausahaan Aset Akibat Pembentukan SOTK Baru sesuai Dengan Pergubsu No. 38 dan 39 tahun 2016
12. Monitoring Tindak Lanjut LHP BPK RI Perwakilan Sumatera Utara
13. Penaksiran/ Penilaian Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara
14. Pemanfaatan Penetapan Status BMD
15. Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provsu
16. Konsultasi Koordinasi dan Komparasi Peraturan dan Kebijakan Daerah Terkait Pemanfaatan Barang Milik Daerah
17. Penyusunan Laporan Tahunan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
18. Penyusunan Laporan Tahunan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
19. Penyediaan Jasa Perizinan Jasa Kendaraan Dinas / Operasional
20. Pelaksanaan Apel Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemprovsu

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

No	Indikator Kinerja	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD		PROYEKSI	
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	WDP	WTP	WTP	WTP
2	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
3	Pembangunan dan Implementasi e-goverment dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang e-budgeting	-	-	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem
4	Melakukan percepatan penyusunan dokumen anggaran, penatausahaan dan realisasi anggaran	-	-	Perda dan Pergub APBD dan P.APBD serta LKPD tepat waktu	Perda dan Pergub APBD dan P.APBD serta LKPD tepat waktu	Perda dan Pergub APBD dan P.APBD serta LKPD tepat waktu	Perda dan Pergub APBD dan P.APBD serta LKPD tepat waktu

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVSU**

H. AGUS TRIPRIYONO, SE, M.Si.Ak, CA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640819 198503 1 003

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Unit Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Kode Rekening							Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018				
									Tahun 2017					Tahun 2018				
									Lokasi	Target capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	20	1	20	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		BPAKD Provsu									
1	20	1	20	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengiriman Surat Dan Paket	BPAKD Provsu	75,000	eks	104,000,000			82,500	eks	114,400,000	
1	20	1	20	05	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Terpelihara Dengan Baik	BPAKD Provsu	215	unit	1,021,600,000	APBD		237	unit	1,123,760,000	APBD
1	20	1	20	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan	Meningkatnya Kelancaran Tugas Dan Administrasi	BPAKD Provsu	4,560	OK	745,080,000	APBD		5,016	OK	819,588,000	APBD
1	20	1	20	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Program Kantor Dengan Baik	BPAKD Provsu	12,500	eks	699,412,666	APBD		13,750	eks	769,353,933	APBD
1	20	1	20	05	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Cetak Dan Penggandaan Dengan Baik	BPAKD Provsu	1,000	buku	510,000,000	APBD		1,100	buku	561,000,000	APBD
1	20	1	20	05	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	BPAKD Provsu	1,075	unit	715,500,000	APBD		1,183	unit	787,050,000	APBD
1	20	1	20	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Informasi Untuk Meningkatkan Kualitas SDM	BPAKD Provsu	420	eks	72,000,000	APBD		462	eks	79,200,000	APBD
1	20	1	20	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan & Minuman Harian Pegawai, Rapat serta Tamu BPKAD	BPAKD Provsu	7,920	OK	691,000,000	APBD		8,712	OK	760,100,000	APBD
1	20	1	20	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya Koordinasi Antar Lembaga Terkait	BPAKD Provsu	3,300	OK	1,700,000,000	APBD		3,630	OK	1,870,000,000	APBD
1	20	1	20	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		BPAKD Provsu				APBD					APBD
1	20	1	20	05	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya Pelayanan Biro Keuangan	BPAKD Provsu	1	thn	2,440,220,000	APBD		1	thn	3,172,286,000	APBD
1	20	1	20	05	02	12	Pengadaan Komputer	Meningkatnya Pelayanan di BPKAD	BPAKD Provsu	1	thn	920,500,000	APBD		1	thn	1,196,650,000	APBD

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018			
			Tahun 2017							Tahun 2018			
			Lokasi	Target capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 20 1 20 05 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan roda 4 dan 2 dengan baik	BPAKD Provsu	1	thn	480,000,000	APBD		1	thn	624,000,000	APBD	
1 20 1 20 05 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		BPAKD Provsu				APBD					APBD	
1 20 1 20 05 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Menunjang pekerjaan ASN Kantor	BPAKD Provsu	1	keg	99,000,000	APBD		1	keg	128,700,000	APBD	
1 20 1 20 05 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Menunjang pekerjaan ASN Kantor	BPAKD Provsu	1	keg	108,000,000	APBD		1	keg	140,400,000	APBD	
1 20 1 20 05 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		BPAKD Provsu				APBD					APBD	
1 20 1 20 05 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kualitas SDM BPKAD	BPAKD Provsu	132	org	300,000,000	APBD		132	org	330,000,000	APBD	
1 20 1 20 05 05 07	Pengelolaan Aset dan Persediaan Menggunakan Aplikasi SIMDA BMD	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	BPAKD Provsu	47	SKPD	1,142,400,000	APBD		47	SKPD	1,256,640,000	APBD	
1 20 1 20 05 05 41	Sosialisasi Pergub Persediaan	Persentase dokumen/Laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	BPAKD Provsu	1	keg	207,220,000	APBD		1	keg	227,942,000	APBD	
1 20 1 20 05 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		BPAKD Provsu				APBD					APBD	
1 20 1 20 05 06 02	Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Triwulan APBD	Meningkatnya Penyelesaian Penyusunan Pelaporan Keuangan triwulan dan Semesteran	BPAKD Provsu	150	Buku	315,800,000	APBD		150	Buku	410,540,000	APBD	
1 20 1 20 05 06 05	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penyelesaian Dokumen Penetapan Kinerja	Tersedianya Penyusunan LAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja	BPAKD Provsu	50	Lap	34,437,250	APBD		50	Lap	44,768,425	APBD	
1 20 1 20 05 06 15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Pelaporan Keuangan Triwulan BPKAD	BPAKD Provsu	95	%	114,999,750	APBD		95	%	149,499,675	APBD	
1 20 1 20 05 06 18	Penyusunan Anggaran Kas Pemprov APBD dan P.APKD	Tersedianya dana dalam membayarkan seluruh tagihan yang dibebankan pada APBD Tahun berkenaan	BPAKD Provsu	200	set	42,199,300	APBD		200	set	54,859,090	APBD	

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018			
			Tahun 2017							Tahun 2018			
			Lokasi	Target capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 20 1 20 05 06 79	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPAKD Provsu	4	dok	1,245,900,185	APBD		4	dok	1,619,670,241	APBD	
1 20 1 20 05 06 80	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	Pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik	BPAKD Provsu	1	lap	323,977,400	APBD		1	lap	421,170,620	APBD	
1 20 1 20 05 06 81	Pengelolaan Pajak PPN dan PPH	Tertibnya administrasi pengelolaan pajak dengan baik	BPAKD Provsu	1	thn	230,000,000	APBD		1	thn	299,000,000	APBD	
1 20 1 20 05 06 82	In House Training Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah bagi SDM Pengelola Keuangan SKPD di Lingkungan Pemprov	BPAKD Provsu	1	keg	285,800,000	APBD		1	keg	371,540,000	APBD	
1 20 1 20 05 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		BPAKD Provsu				APBD					APBD	
1 20 1 20 05 17 25	Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku Standar Harga Tahun 2018	BPAKD Provsu	300	buku	260,798,575	APBD		300.00	buku	339,038,148	APBD	
1 20 1 20 05 17 28	Pemuktahiran Data Aset Tetap Milik Pemprov	Laporan Data Aset Tetap Miik Pemprov	BPAKD Provsu	47	SKPD	206,799,525	APBD		47	SKPD	268,839,380	APBD	
1 20 1 20 05 17 31	Penertiban Aset	Tertibnya Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemprov	BPAKD Provsu	47	SKPD	412,000,000	APBD		47	SKPD	535,600,000	APBD	
1 20 1 20 05 17 37	Penghapusan Aset Tetap dan Barang Inventaris Lainnya	SK Gubsu tentang penghapusan/penjualan aset tetap dan barang inventaris lainnya milik Pemprov	BPAKD Provsu	1	thn	170,000,000	APBD		1	thn	221,000,000	APBD	
1 20 1 20 05 17 48	Tim Task Force Pembinaan Aset	Tertibnya Pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di Pemprov	BPAKD Provsu	47	SKPD	1,066,800,000	APBD		47	SKPD	1,386,840,000	APBD	
1 20 1 20 05 17 49	Verifikasi dan Rekonsiliasi Pengalihan Kewenangan Pengelolaan BMD dari	Buku Inventaris P3D	BPAKD Provsu	95	%	816,600,000	APBD		95	%	1,061,580,000	APBD	
1 20 1 20 05 17 52	Sosialisasi Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	BPAKD Provsu	1	Keg	488,000,000	APBD		1	Keg	634,400,000	APBD	

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018			
			Tahun 2017							Tahun 2018			
			Lokasi	Target capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 20 1 20 05 17 53	Monitoring dan Verifikasi data mutasi BMD dalam rangka memenuhi amanat PP 18 Tahun 2016	Adanya dokumen mutasi barang di lingkungan Pemprov	BPAKD Provsu	97	%	108,360,000	APBD		97	%	140,868,000	APBD	
1 20 1 20 05 17 54	Pembuatan Status Pemanfaatan BMD	Kegiatan Status Pemanfaatan Barang Daerah	BPAKD Provsu	47	SKPD	157,900,000	APBD		47	SKPD	205,270,000	APBD	
1 20 1 20 05 17 55	Pengurusan dan pembaharuan sertifikasi tanah milik Pemprov akibat pemekaran wilayah Kab/Kota	Pengumpulan dan Pengurusan Sertifikat Tanah Milik Pemprov	BPAKD Provsu	95	%	510,000,000	APBD		95	%	663,000,000	APBD	
1 20 1 20 05 17 56	Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan barang tidak bergerak milik pemprov	Termonitornya Aset Tidak bergerak di 2 Kab/Kota	BPAKD Provsu	2	Dok	133,000,000	APBD		2	Dok	172,900,000	APBD	
1 20 1 20 05 17 58	Peningkatan Kualitas SDM Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Termonitornya Aset Tidak bergerak di 2 Kab/Kota	BPAKD Provsu	2	Dok	122,000,000	APBD		2	Dok	158,600,000	APBD	
1 20 1 20 05 17 61	Evaluasi Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Evaluasi Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKPBMD) serta Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya RKBMD dan RKPBMMD dan DKBMD dan DKPBMD di lingkungan Pemprov	BPAKD Provsu	47	SKPD	304,800,000	APBD		47	SKPD	396,240,000	APBD	
1 20 1 20 05 36	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		BPAKD Provsu				APBD					APBD	
1 20 1 20 05 36 26	Peningkatan Administrasi Dalam Rangka Penutupan Buku Akhir Tahun	Tercapainya pengelolaan keuangan daerah secara tepat waktu	BPAKD Provsu	1	Keg	68,740,000	APBD		1	Keg	89,362,000	APBD	
1 20 1 20 05 36 43	Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara	Tersusunnya ranperda APBD TA.2018 dan ranpergub penjabaran APBD 2018	BPAKD Provsu	150	buku	2,848,216,830	APBD		150	buku	3,702,681,879	APBD	
1 20 1 20 05 36 44	Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara	Tersusunnya ranperda tentang Perubahan APBD TA.2017 dan ranpergub tentang penjabaran Perubahan APBD 2017	BPAKD Provsu	150	buku	2,832,216,830	APBD		150	buku	3,681,881,879	APBD	

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018			
			Tahun 2017							Tahun 2018			
			Lokasi	Target capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 20 1 20 05 36 45	Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Adanya sinkronisasi APBD/PAPBD Kab/Kota dengan APBD/PAPBD Provinsi Sumatera Utara dan sesuai dengan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	BPAKD Provsu	33	SK	893,400,000	APBD		33	SK	1,161,420,000	APBD	
1 20 1 20 05 36 46	Penyusunan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara		BPAKD Provsu	1	Keg	1,966,304,675	APBD		1	Keg	2,556,196,078	APBD	
1 20 1 20 05 36 47	Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara	Tersusunnya buku Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA.2017	BPAKD Provsu	150	buku	1,966,304,675	APBD		150	buku	2,556,196,078	APBD	
1 20 1 20 05 36 48	Tim Pembinaan Administrasi Gaji PNS Daerah pada SKPD di Lingkungan Pemprov	Tertibnya administrasi pembayaran gaji yang Akurat	BPAKD Provsu	1	Tahun	369,554,400	APBD		1	Tahun	488,520,720	APBD	
1 20 1 20 05 36 49	Bintek Penyusunan Laporan keuangan Berbasis Akrua di Lingkungan Pemprov	Meningkatnya pengetahuan tentang prosedur penyusunan laporan keuangan berbasis akrual	BPAKD Provsu	1	Keg	305,800,000	APBD		1	Keg	397,540,000	APBD	
1 20 1 20 05 36 50	Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	Tersosialisasinya Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	BPAKD Provsu	33	Kab/Kota	199,202,191	APBD		33	Kab/Kota	258,962,848	APBD	
1 20 1 20 05 36 51	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Laporan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	BPAKD Provsu	33	SK	300,900,000	APBD		33	SK	391,170,000	APBD	
1 20 1 20 05 36 52	Sosialisasi Sisdur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah	Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara mengenai penatausahaan keuangan daerah	BPAKD Provsu	1	Keg	42,325,000	APBD		1	Keg	55,022,500	APBD	
1 20 1 20 05 36 53	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sistem Cash Managemen Sistem (CMS)	Peningkatan kualitas pelayanan system Cash Manajemen System (CMS)	BPAKD Provsu	1	Keg	232,770,000	APBD		1	Keg	302,601,000	APBD	
1 20 1 20 05 36 54	Penatausahaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Hibah	Tertatanya Penatausahaan Bantuan Keuangan dan Hibah	BPAKD Provsu	1	Tahun	360,301,620	APBD		1	Tahun	468,392,106	APBD	

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018			
			Tahun 2017							Tahun 2018			
			Lokasi	Target capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 20 1 20 05 36 55	Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) SKPD	Tercapainya verifikasi DPA/DPPA/DPAL SKPD TA. 2017	BPAKD Provsu	204	Dok	1,971,000,000	APBD		204	Dok	2,562,300,000	APBD	
1 20 1 20 05 36 57	Penyusunan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemrovsu	Meningkatnya Waktu Penyelesaian Penyusunan Laporan Keuangan Pemrovsu	BPAKD Provsu	1	Keg	520,000,000	APBD		1	Keg	676,000,000	APBD	
1 20 1 20 05 36 66	Penyelenggaraan Outbond PNS di lingkungan BPKAD Provsu	Outbound PNS di lingkungan BPKAD terselenggara	BPAKD Provsu	1	Keg	250,000,000	APBD		1	Keg	325,000,000	APBD	
1 20 1 20 05 36 68	Penyusunan RKA BPKAD APBD dan RKA BPKAD Perubahan APBD	Tersedianya RKA BPKAD TA. 2018 dan RKA BPKAD Perubahan APBD TA. 2017	BPAKD Provsu	2	Dok	13,200,000	APBD		2	Dok	16,400,000	APBD	
1 20 1 20 05 36 69	Penyusunan Renja BPKAD Provsu	Tersedianya dokumen Renja BPKAD 2018	BPAKD Provsu	4	Dok	26,738,003	APBD		4	Dok	34,759,404	APBD	
1 20 1 20 05 36 95	Penyusunan dan Rekapitulasi data APBD Kab./Kota	Tersedianya data APBD Pemerintah Kab./Kota	BPAKD Provsu	4	Dok	105,420,000	APBD		4	Dok	137,046,000	APBD	
1 20 1 20 05 36 96	Monitoring dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan Penyempurnaan APBD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi	BPAKD Provsu	33	Lap	279,760,000	APBD		33	Lap	363,688,000	APBD	
1 20 1 20 05 36 131	Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD	Evaluasi APBD Kab./Kota sesuai Permendagri	BPAKD Provsu	1	Keg	160,260,000	APBD		1	Keg	208,338,000	APBD	
1 20 1 20 05 36 135	Pengelolaan Aplikasi SIMDA dalam Penyusunan Pengelolaan Anggaran	Penyusunan APBD melalui SIMDA	BPAKD Provsu	1	Tahun	198,000,000	APBD		1	Tahun	257,400,000	APBD	
1 20 1 20 05 36 136	Penyusunan DPA BPKAD dan DPPA BPKAD Provsu	Tersedianya DPA dan DPPA BPKAD	BPAKD Provsu	4	Dok	22,202,070	APBD		4	Dok	28862691	APBD	
1 20 1 20 05 36 137	Penyimpanan, Penataan dan Pengarsipan Berkas BPKAD Provsu	Terlaksananya penataan berkas/dokumen dengan baik	BPAKD Provsu	1	Tahun	240,000,000	APBD		1	Tahun	312,000,000	APBD	

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018			
			Tahun 2017							Tahun 2018			
			Lokasi	Target capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 20 1 20 05 36 144	Pengelolaan Aplikasi SIMDA Integrasi Cash Manajemen System (CMS) dalam Penatausahaan Keuangan pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Pengelolaan keuangan semakin baik dengan aplikasi SIMDA	BPAKD Provsu	1	Tahun	400,960,000	APBD		1	Tahun	521,248,000	APBD	
1 20 1 20 05 36 153	Rapat Kerja Teknis Keuangan Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Keuangan Kab/Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku	BPAKD Provsu	1	Keg	334,499,815	APBD		1	Keg	434,849,760	APBD	
1 20 1 20 05 36 154	Forum Group Diskusi Akuntansi Se-Sumatera Utara	Kebijakan akuntansi pema yang selaras dengan peraturan yang berlaku	BPAKD Provsu	1	Keg	301,139,815	APBD		1	Keg	391,481,760	APBD	
1 20 1 20 05 36 155	Sinkronisasi dan Harmonisasi Eksekutif dan Legislatif dalam Perencanaan Penganggaran Pembangunan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran Pembangunan dengan baik	BPAKD Provsu	1	Keg	650,000,000	APBD		1	Keg	845,000,000	APBD	
1 20 1 20 05 36 156	Workshop Inventarisasi Aset	Terlaksananya Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPAKD Provsu	1	Keg	800,000,000	APBD		1	Keg	1,040,000,000	APBD	
1 20 1 20 05 36 157	Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017	Tersusunnya ranperda APBD TA.2017 dan ranpergub penjabaran APBD 2017	BPAKD Provsu	1	Keg	2,316,179,425	APBD		1	Keg	3,011,033,253	APBD	
1 20 1 20 05 36 158	Penyusunan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017	Tersusunnya buku KUA dan PPAS TA.2017	BPAKD Provsu	150	buku	624,000,000	APBD		150	buku	811,200,000	APBD	
1 20 1 20 05 36 159	Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan Standard Pelayanan dan Standard Operasional Procedur Administrasi Pemerintah	Terlaksananya Standar Pelayanan & Standart Operasional Prosedur dalam Administrasi Pemerintah	BPAKD Provsu	1	Keg	200,000,000	APBD		1	Keg	260,000,000	APBD	
1 20 1 20 05 36 160	Verifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) SKPD	Tercapainya verifikasi RKA dan RKA Perubahan SKPD TA. 2017	BPAKD Provsu	204	Dok	1,971,000,000	APBD		204	Dok	2,562,300,000	APBD	
1 20 1 20 05 36 161	Pembuatan Website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tersedianya Informasi Pengelolaan Keuangan	BPAKD Provsu	1	Tahun	50,000,000	APBD		1	Tahun	65,000,000	APBD	
1 20 1 20 05 36 162	Tim Informasi Media Sosial dan SMS pengaduan BPKAD	Tersedianya Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPAKD Provsu	1	Keg	230,000,000	APBD		1	Keg	299,000,000	APBD	
1 20 1 20 05 36 163	Koordinasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya koordinasi dan pelaporan Dana DAK SKPD dan Kemenkeu	BPAKD Provsu	1	Tahun	350,000,000	APBD		1	Tahun	455,000,000	APBD	

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018			
			Tahun 2017							Tahun 2018			
			Lokasi	Target capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 20 1 20 05 36 186	Pembinaan Penatausahaan Bendahara Daerah	Terciptanya Penatausahaan Bendahara yang baik	BPAKD Provsu	1	Keg	500,000,000	APBD		1	Keg	650,000,000	APBD	
1 20 1 20 05 36 187	Pembuatan Sistem E-Keuangan	Tersedianya Sistem E-Keuangan di Pemprovsu	BPAKD Provsu	1	Keg	1,280,000,000	APBD		1	Keg	1,664,000,000	APBD	

Medan,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVSU

H. AGUS TRIPRIYONO, SE, M.Si.Ak, CA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640819 198503 1 003

CX

